

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI

M. Yunus<sup>1</sup>, Sherly Mutia Ivanka<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam '45 Bekasi

Correspondent author: [map.yunus@gmail.com](mailto:map.yunus@gmail.com)  
Bekasi, 17113, Indonesia

### Abstract

*This research explores the implementation of the Pre-Employment Card Program in Bekasi Regency based on Presidential Regulation No. 76 of 2020. The implementation of the pre-employment card program has experienced various problems, including failing to register, failing to participate because the quota has been met, failing to connect to an account, problems in training such as certification that is difficult to issue, and finally funds that fail to be disbursed. The research objectives are to analyze the implementation of the regulation, identify inhibiting factors, and evaluate community perceptions. The qualitative research method with case studies involved observation and in-depth interviews. The results of this study indicate that the Implementation of the Pre-Employment Card Program in Bekasi Regency has been running quite well but there are still obstacles to the Population Identification Number when registering and also there are still many people in Bekasi Regency who are unfamiliar with technology or social media. The public perception of the pre-employment card program is a program that gets free training, certificates, and incentives. The pre-employment card program is very useful and helps the community because it is a program that is devoted to increasing community competence or skills. Due to the covid-19 pandemic, the government provided incentive funds to the community of 600 thousand per person after completing all training.*

**Keywords:** *Implementation; Job competence; Public policy; Presidential decree; Pre-Employment Card*

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020. Implementasi program kartu prakerja yang mengalami berbagai masalah diantaranya yaitu gagal pada saat mendaftar, gagal ikut karena kuota telah terpenuhi, gagal menyambungkan ke rekening, masalah di pelatihan seperti sertifikasi susah keluar, dan yang terakhir dana yang gagal cair. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi peraturan, mengidentifikasi faktor penghambat, dan mengevaluasi persepsi masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus melibatkan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan cukup baik tetapi masih ada kendala pada Nomor Induk Kependudukan saat mendaftar dan juga masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang awam akan teknologi atau sosial media. Persepsi masyarakat mengenai program kartu prakerja yaitu sebuah program yang mendapatkan pelatihan gratis, bersertifikat, dan ada insentifnya. Program kartu prakerja sangat bermanfaat dan membantu masyarakat karena merupakan sebuah program yang dikhususkan untuk meningkatkan kompetensi atau *skill* masyarakat. Dikarenakan terjadi pandemi covid-19 pemerintah memberikan dana insentif kepada masyarakat sebesar 600 ribu per- orang setelah menyelesaikan seluruh pelatihan.

**Kata Kunci:** *Implementasi; Kartu Prakerja; Kebijakan Publik; Kompetensi Kerja; Peraturan Presiden;*

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, yaitu sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut *virus corona disease* 2019. Pandemi COVID-19 merupakan wabah internasional yang saat ini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. COVID-19 menyebar secara luas dan cepat, melalui perantara dari satu manusia ke manusia lain. Status covid saat ini memang menjadi begitu darurat, sebagai bukti adalah dengan melihat fakta di lapangan. Selain itu badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) juga telah memberikan pernyataan serius kepada seluruh negara untuk mengingatkan penduduk di dunia agar melakukan kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan cepat. (Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan 2020). Di masa COVID-19, salah satu kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan melibatkan kemitraan dari berbagai multi- perusahaan di Indonesia. Program Kartu Prakerja ini menjadi begitu berarti untuk membantu masyarakat kecil dan sangat berguna bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan kesejahteraan pangan dalam jangka waktu tertentu.

Dampak dari COVID-19 dapat dikatakan sedikit teratasi melalui program Kartu Prakerja, walaupun demikian tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan akses program Kartu Prakerja dikarenakan banyak faktor dan syarat yang berlaku seperti ketatnya proses seleksi, keterbatasan informasi, kemauan, minat, dan lain sebagainya. Kartu Prakerja muncul sebagai satu program yang memberikan ruang keterbukaan serta untuk mengembangkan potensi untuk memicu perkembangan kreativitas bagi masyarakat kecil melalui sistem pelatihan secara *online*. (T. Predianto, Khoirurrosyidin 2020).

Di dalam program Kartu Prakerja, masyarakat juga disuguhkan dengan akses yang cukup luas untuk meningkatkan kompetensi diri dalam bidang tertentu.. Selain itu, berbagai platform digital juga menyertai proses dan pelayanan untuk Prakerja ini seperti Tokopedia, Bukalapak, *Skill Academy*, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa. Pemerintah akhirnya mempercepat untuk memutuskan realisasi program Kartu Pra Kerja 2020 secara nasional. Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Pra Kerja dipercepat sebagai salah satu langkah bentuk program implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Re-Focusing* Kegiatan, Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang sudah menyebar di hampir seluruh dunia.

Akibat dari pandemi COVID19, pemerintah akhirnya menaikkan anggaran hingga Rp. 20 triliun untuk target sasaran sebanyak 5,6 juta peserta yang mengikuti program kartu prakerja. Adapun rincian pengeluarannya adalah 1 juta rupiah per orang yang dibayarkan

secara langsung kepada lembaga pelatihan, besar biaya insentif pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah per orang, dan biaya insentif survei keberkerjaan sebesar 150 ribu rupiah per orang. Jika di awal rencana Kartu Pra Kerja terbuka untuk umum, termasuk yang sudah bekerja, saat ini di masa pandemi COVID-19 hanya diprioritaskan untuk pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Kartu pra kerja merupakan program pemerintah sejak awal, sebuah langkah baik jika dilihat dari target yang akan dicapai yaitu menyiapkan keahlian bagi para pencari kerja.

Kehadiran program Kartu Prakerja merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia yang tentunya dilatarbelakangi atas dasar kepedulian tinggi terhadap warga masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dimana mayoritas masyarakat yang memang sedang mengalami kebuntuan terutama soal pemenuhan kebutuhan (ekonomi). Segala aktivitas pun menjadi terhambat, atau memang menurun secara produktivitas dan penghasilan. Hal ini didukung dengan data penerimaan pajak yang mengalami tekanan akibat dari melemahnya tren industri serta aktivitas perdagangan dan ekonomi internasional. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Provinsi Pergub Provinsi Jawa Barat No.6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, kemudian dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi masalah-masalah timbul dalam program kartu prakerja ini yaitu diantaranya gagal pada saat mendaftar, gagal ikut karena kuota gelombang sudah terpenuhi, gagal menyambungkan ke rekening, problem di pelatihan seperti sertifikiat susah atau lama keluar, dan yang terakhir dana yang gagal cair. Program kartu prakerja dinilai tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang terkena dampak akibat Covid-19. Pemerintah pun mengalihkan fungsi kartu prakerja tersebut menjadi bantuan sosial atau bansos selama pandemi corona yang juga termasuk ke dalam bantuan langsung tunai.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyatakan ada kendala pendaftaran program kartu prakerja yang dialami pendaftar antar lain seperti koneksi, ponsel hingga tidak adanya *email* pribadi. Pihak dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi akan memfasilitasi warga mendaftarkan diri untuk mengikuti program prakerja, antara lain dengan menyediakan komputer dan akses internet. Karena sulitnya masyarakat mengakses secara *online (daring)* selanjutnya Bupati menginstruksikan kepada kepala dinas ketenagakerjaan

agar membantu dan memandu pelayanan pendaftaran Kartu Prakerja, karena memang orang awam kesulitan (mendaftar), mencoba berkali-kali tetap tidak dapat masuk.

Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah mesti menyediakan fasilitas berupa perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau telepon genggam serta akses internet serta membimbing warga yang hendak mendaftar menjadi peserta program prakerja. Kepala Dinas Kabupaten Bekasi menyiapkan mekanismenya, seperti menyediakan spot (titik) untuk mendaftar. Namun masih mengkaji seperti apa, terutama agar memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus. Teknik perekrutan informan yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik perolehan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, observasi, dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam data ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara yang mendalam terhadap pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, dan masyarakat yang telah menerima kartu prakerja. Menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal-jurnal. Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel implementor adalah seseorang yang memahami substansi Peraturan Presiden No.76 tahun 2020, memahami sistem mengenai pelaksanaan program kartu prakerja, memahami tentang implementasi kartu prakerja pada masa pandemi covid-19, dan Memahami tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di Kabupaten Bekasi. Dan kriteria informan untuk sampel masyarakat yaitu masyarakat yang mendapatkan kartu prakerja di Kabupaten Bekasi. Masyarakat penerima bantuan pogram kartu prakerja yaitu masyarakat yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, *fresh graduation*, dan yang sedang bekerja. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada instrumen mana sebuah kebijakan itu cocok untuk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”, dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Namun untuk kasus penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dari teori Edwards III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

### Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan hasil penelitian indikator komunikasi yang dimaksud yaitu Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam menyampaikan program kartu prakerja kepada masyarakat yaitu dengan memasang banner di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan dalam hal membantu masyarakat yang tidak mengerti atau terdapat kendala dalam program kartu prakerja yaitu dengan cara di bantu, masyarakat akan dibantu untuk memahami tentang program kartu prakerja. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi selalu membantu masyarakat dari yang tidak paham dengan program kartu prakerja menjadi paham. Komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak *intern* yaitu dengan selalu berkoordinasi khususnya di dalam Dinas Ketenagakerjaan, terkait dengan program kartu prakerja ini selalu

mengadakan koordinasi dengan pimpinan paling atas kepala dinas hingga ke paling bawah yaitu kepala seksi. Kartu prakerja ini fokusnya di pasar kerja karena disposisi jadi kartu prakerja difokuskan ke bidang pelatihan tetapi juga selalu berkoordinasi dengan bidang informasi pasar kerja. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak-pihak *ekstern* dalam membantu berjalannya program kartu prakerja ini yaitu dengan langsung mengambil masyarakat yang putus kerja. Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi selalu mengadakan kompetensi kerja dan juga mengarahkan cara pembuatan akun kartu prakerja agar bisa mendapatkan kartu prakerja.

### **Sumber Daya**

Sumber Daya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang ikut membantu menjalankan program kartu prakerja dari pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. sumber daya di Dinas Ketenagakerjaan sudah mencukupi yaitu terdapat di bidang pelatihan yang terdiri dari satu kepala bidang, kepala seksi, dan pelaksana. Pelaksana PNS terdapat 3 orang dan THR terdapat 5 orang serta dibantu oleh bidang informasi pasca kerja. Bidang informasi pasca kerja terdiri dari satu kepala bidang, dua kepala seksi. PNS satu orang dan sisanya pelaksana THR/Magang. Stakeholder di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yaitu melalui masyarakat yang ingin dilatih oleh pihak Dinas yang bertempat di BLK (Balai Latihan Kerja). Terdapat peningkatan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yaitu pembinaan pegawai, dan terdapat juga pelatihan langsung dari pusat yaitu berupa undangan untuk beberapa orang dan juga undangan dari pusat untuk penempatan dan undangannya itu *by person by skill*. Syarat umum setahun sekali pihak dinas selalu ada pengembangan SDM untuk peningkatan kapasitas.

### **Disposisi**

Disposisi yaitu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam penelitian ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai perantara program kartu prakerja antara pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan masyarakat. kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sesuai dengan pemahaman masing-masing karena pihak Dinas Ketenagakerjaan tidak diikutsertakan dan hanya membantu masyarakat saja. Untuk semua data yang terkait dengan program kartu prakerja terdapat di pusat. Sikap pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan adanya program kartu prakerja

yaitu bahwa program kartu prakerja ini merupakan program yang bagus dan menjadi salah satu alternatif solusi untuk pengembangan kompetensi kerja dan juga sebagai pengaman karena terdapat insentif. Kewenangan dan tanggung jawab di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi merupakan peranan yang sangat penting karena mempunyai tugasnya masing-masing. Struktur birokrasi dalam penelitian ini merupakan struktur dari kepengurusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terkait Pengembangan Kompetensi Kerja Program Kartu Prakerja. Struktur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terdiri dari kepala dinas, sekertaris, eslon 2 3a kasubag. Dibawah sekertaris dinas ada 3 kasubag ruangan kepegawaian sama perencanaan disebut dengan bagian TU dibawahnya terdapat 4 bidang Bidang HI (Hubungan Industri) yang membawahi 3 KASI. Bidang penempatan mebahahi 3 KASI. Bidang pelatihan membawahi 3 KASI. Bidang IPK membawahi 3 KASI. Masing-masing KASI ini mebahahi beberapa pelaksanaan dan ada juga fungsional mediator sama fungsional pencari kerja.

### **Faktor Penghambat Implementasi Program Kartu Prakerja**

Hambatan dalam program kartu prakerja yaitu dikarenakan program baru yang sistemnya *online* seperti masalah data seperti NIK KTP, Alamat dan proses sharing-nya karena merupakan suatu program yang berbasis *online*, dari mulai pembuatan akun, login, pelatihannya, dan mendapatkan sertifikatnya secara online. Serta masih banyak masyarakat awam di pedesaan/perkampungan yang tidak terlalu mengerti sistem digital. KTP yang sekarang sudah e-KTP kalau dulu masih belum e-KTP jadi banyak validasi-validasi yang *double* (*double* nama). Masih banyak dari beberapa masyarakat kebingungan dengan alur pendaftaran dan *login* program kartu prakerja. Memang saat seserorang mencari kerja maupun membuka usaha, ia akan berupaya mempromosikan produk atau kemampuan yang ia miliki.

### **Persepsi Masyarakat Dalam Merespon Kartu Prakerja**

Menyerap, Program kartu prakerja adalah program yang bersertifikat dan mendapatkan insentif, program yang mendapatkan pelatihan secara gratis, dan program yang dibuat untuk meningkatkan kualitas SDM di masa pandemi ini. Terdapat dua tes kemampuan dalam mengikuti program kartu prakerja yaitu tes kemampuan dan tes motivasi. Untuk mengikuti pelatihan kartu prakerja harus mengikuti dua tes yang terdiri dari tes kemampuan dasar dan tes motivasi. Tes kemampuan yaitu seperti tes kemampuan dasar bersifat umum dan tes motivasi yaitu seperti motivasi diri sendiri.

Mengerti, Terdapat kesulitan dalam membuat akun kartu prakerja yaitu penuhnya gelombang yang didaftar, dan tidak ada nya kesulitan dalam login kartu prakerja.

Anggaran kartu prakerja tidak langsung keluar atau diterima tetapi harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu. Dan terdapat pilihan aplikasi untuk menerima insentif setelah menyelesaikan pelatihan kartu prakerja yaitu OVO, DANA, GOPAY, dan semacamnya.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi). Menurut indikator implementasi Edward III (1980:10) indikator yang pertama yaitu komunikasi, komunikasi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam menyampaikan tujuan dan program yang akan dilaksanakan yaitu melalui banner yang terdapat di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan yang hanya mengundang perwakilan seperti tokoh masyarakat saja yang datang ke Dinas Ketenagakerjaan. Indikator kedua sumber daya, sarana dan prasarana sudah cukup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sudah cukup dan semua berada di Balai Latihan Kerja tepatnya di daerah Gabus Kabupaten Bekasi. Kemudian sumber daya manusia yang masih relatif dalam menjalankan pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja ini. Indikator ketiga yaitu disposisi yaitu dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih relatif sehingga pemahaman mereka dalam menjalankan program pun hanya berdasarkan kemampuan mereka saja. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dikarenakan pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sehingga penyusunan struktur pun berdasarkan kemampuan mereka saling membackup satu sama lain.

Terdapat hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yaitu: Pertama terdapat masalah pada SDM program kartu prakerja yang mengarah pada sisi jabatan. Yaitu: sulitnya dalam mendapatkan *programmers* yang *high* kompeten. Kedua, selama 2 tahun terakhir ini banyak PMO Kartu Prakerja Kemenko yang pindah ke swasta karena mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Ketiga, pada awal berjalannya program kartu prakerja terjadi masalah hambatan karena merupakan program baru yang sistemnya *online* seperti masalah data seperti NIK, Alamat dan proses sharing-nya. Dan yang keempat yaitu masih banyak masyarakat awam yang di pedesaan/perkampungan yang tidak terlalu mengerti sistem digital.

Persepsi masyarakat menurut indikator Hamka (2002: 101-106) mengenai program kartu prakerja ini yaitu sebuah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga merupakan pelatihan gratis yang mendapatkan sertifikat dan insentif. Masih terdapat kendala dalam melakukan proses pendaftaran ataupun login di *website* kartu prakerja. Dan harapan masyarakat dengan adanya program kartu prakerja ini yaitu dapat meningkatkan kualitas calon pekerja, mendapatkan pekerjaan untuk rekan- rekan/ masyarakat yang belum bekerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bekasi menghadapi beberapa hambatan, termasuk kendala dalam komunikasi, sumber daya manusia yang relatif, disposisi yang terbatas, dan struktur birokrasi yang kurang. Tantangan lainnya meliputi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja berkualitas, perpindahan personel Kartu Prakerja ke sektor swasta, masalah teknis dalam sistem online, dan kurangnya pemahaman teknologi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, program ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan gratis yang berujung pada peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Harapan masyarakat adalah agar program ini dapat terus meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi yang belum bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Lidwina (9/4/2020, 12.32 WIB) Manfaat Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp 3,5 Juta per orang. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/09/akibat-corona-manfaat-kartu-prakerja-jadi-rp-355-juta-per-orang>
- Arifin AS, Fuady Ikhsan, dan Kuswarno E (2017) Analisis faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap keberadaan perda Syariah Di Kota Serang.
- Choeri, I., & Niam, M. Z. (2017). Praktik Transaksi Jual Beli Online "Meubel" Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 176-188.
- CNN Indonesia (Senin, 06/04/2020 17:52 WIB) Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pencairan Uang Kartu Prakerja diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200406171417-532-490891/sri-mulyani-terbitkan-aturanpencairan-uang-kartu-prakerja>
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 973-15.
- Hayat (2018) Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Irwanto, (2002) Psikologi Umum, Jakarta: PT. Prehalindo. Hal 71.
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85-99.
- KOMPAS.com Dandy Bayu Bramasta (04/11/2020 15:30 WIB) Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Ditutup Hari Ini diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/04/073000165/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-11-ditutup-hari-ini-simak-cara?page=all>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- M. Rizka (Rabu, 15 April 2020, 07.47) Pendaftar Program Kartu Prakerja di Bekasi Di fasilitasi Pemkab. Diakses dari <https://jabarnews.com/read/84059/pendaftar-program-kartu-prakerja-di-bekasi-difasilitasi-pemkab/1>
- Moleong Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 320

- Moleong, Lexy J. (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 49
- Muhammad Sabiq Baliyah (2021). Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah. (Al-Balad: Journal of Constitutional Law), Volume 3 Nomor 2
- Murti, A. C., & Pinem, A. P. R. (2020). Perancangan Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web Responsive. *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, 1(2), 49-54.
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105-119.
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), 115-127.
- Raco (2018) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 2(1), 90-102.
- Riant Nugroho (2011) *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 57-60 dan 77-82,
- Riant Nugroho (2016) *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 10
- Riska Alika (1 April 2020, 12:34) Anggaran Kartu Prakerja Naik jadi Rp 20 Triliun, per Orang Rp 3,5 Juta diakses dari [https://katadata.co.id/agungjat\\_miko/finansial/5e9a41f777389/anggaran-kartu-prakerja-naik-jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta](https://katadata.co.id/agungjat_miko/finansial/5e9a41f777389/anggaran-kartu-prakerja-naik-jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta)
- Riska Alika (21 April 2020, 13:46) Pemerintah: Kartu Prakerja Jadi Bansos selama Pandemi Corona diakses dari [https://katadata.co.id/febrinaisk\\_ana/berita/5e9eb222d15ed/pemerintah-kartu-prakerja-jadi-bansos-selama-pandemicorona](https://katadata.co.id/febrinaisk_ana/berita/5e9eb222d15ed/pemerintah-kartu-prakerja-jadi-bansos-selama-pandemicorona)
- Ristiyanti Prasetijo, John J.O.I Ihalauw (2005) *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi. Hal 69
- Robert Kreitner Angelo Kinicki (2003:67) *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*. Jakarta Salemba Empat
- Ruangguru (Sep 15, 2020) Program Kartu Prakerja, Sebenarnya untuk Siapa, sih? Diakses dari [https://blog.ruangguru.com/pro\\_gram-kartu-prakerja-sebenarnya-untuk-siapa-sih](https://blog.ruangguru.com/pro_gram-kartu-prakerja-sebenarnya-untuk-siapa-sih)
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(4), 6737-6750.
- Simbolon, M. (2007). PERSEPSI DAN KEPRIBADIAN. *Jurnal Ekonomis*, 1(1), 52-66.
- Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). Realokasi Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung

- Intensifikasi Sektor Pertanian. *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 4(1), 1-13.
- Sugiono, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 270
- Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 109-122.
- Wildan Rahmansyah (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal PKN STAN*, 2(1).
- Yudiatmaja, Wahyu Eko (2016) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.